

# HENTIKAN REVISI UUPA 1960 UNTUK NEOIMPERIALISME !!!

Idham Samudra Bey<sup>1</sup>

## ABSTRACT

*Reformation in Indonesia, which was started by the fall of the New Order regime, apparently took on the meaning as the true implementation of neo liberalism such as economical liberalization, free trade, privatization, restructuring, governance, farming liberalization, and others. This is for the interest of expanding the modal of international capitalist. In the height of this neo liberalism phase, UUPA 1960 once faced challenges with the emergence of several proposed decrees (RUU) such as RUU Management of Natural Resources, RUU Water Resources, RUU Plantation, RUU Conservation and Exploitation of Genetics Resources, RUU Property, among others.*

*Sebagai angin yang makin lama makin keras bertiup, sebagai aliran sungai yang makin lama makin membanjir, sebagai gemuruh tentara menang yang masuk ke dalam kota yang kalah, maka sesudah Undang-undang Agraria dan Undang-undang Tanaman Tebu de Waal di dalam tahun 1870 diterima baik oleh Staten-General di negeri Belanda, masuklah modal partikelir itu di Indonesia,- mengadakan pabrik-pabrik gula di mana-mana, kebon-kebon teh, onderneming-onderneming tembakau dsb., ditambah lagi modal partikelir yang membuka macam-macam perusahaan tambang, macam-macam perusahaan kereta api, trem, kapal, atau pabrik-pabrik yang lain. (Sukarno, 1930)*

<sup>1</sup> Idham Samudera Bey, Ketua Centre for National-Democracy Studies (CNDS)

## PENDAHULUAN

**A**pa yang dikemukakan Bung Karno dalam pidato pembelaannya di depan hakim kolonial mengenai gambaran keadaan Indonesia setelah diberlakukannya “*opendeur-politiek*” (politik pintu terbuka) seperti tersebut di atas, demikianlah kira-kira (untuk tidak mengatakan jauh lebih buruk lagi) gambaran keadaan negara Indonesia pada saat ini maupun di masa mendatang. Jika di masa kolonial itu Indonesia yang berstatus negeri jajahan mengalami transisi dari era *cultuurstelsel* menuju era penerapan kebijaksanaan politik pintu terbuka, kini Indonesia yang berstatus negeri merdeka mengalami transisi dari era fasis-kapitalistik menuju era penerapan murni kebijaksanaan neoliberalisme. Kalaupun ada perbedaan antara kedua transisi tersebut, perbedaan itu hanya pada kontekstualitas historisnya saja, bukan pada “karakter dasar” kepentingan transisinya.

Seperti diketahui bersama, politik pintu terbuka merupakan manifestasi kebijaksanaan

imperialisme modern, menggantikan posisi *cultuurstelsel* yang merupakan manifestasi kebijaksanaan imperialisme tua. Pergantian ini hanya pada bentuknya saja, yakni dari bentuk yang brutal berganti menjadi kelihatan lebih sopan. Dalam masa inilah *Agrarische Wet* lahir. Sudah umum diketahui kalau kelahiran *Agrarische Wet* pada tahun 1870 ini karena desakan pengusaha besar swasta Belanda, yang bertujuan ingin mendapatkan jaminan hukum agar memperoleh peluang lebih besar untuk dapat berkembang di Hindia Belanda. Sebelumnya mereka mengalami kesulitan untuk berkembang, ketika politik masih dimonopoli negara. Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan kesulitan berkembang adalah ketidakleluasaan mereka untuk merampas dan menguras kekayaan alam Indonesia.

Setelah penerapan politik pintu terbuka dan pemberlakuan *Agrarische Wet* ini, menyeruaklah situasi yang digambarkan Bung Karno di atas. Bukan hanya modal swasta Belanda saja yang mengeruk surplus ekonomi rakyat Indonesia,

tetapi juga modal asing dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang juga turut menguras habis surplus ekonomi rakyat Indonesia. Banyak hasil studi mengungkapkan bahwa cara baru ekspansi modal asing ini bukan saja telah merampas kekayaan alam nasional secara massif, tetapi juga semakin memperluas ladang kemiskinan, kemelaratan, dan keterbelakangan yang telah ada di dalam kehidupan rakyat Indonesia (lihat, a.l. Arief dan Sasono, 1981). Artinya, dampak yang ditimbulkan oleh imperialisme modern ini terhadap kehidupan rakyat Indonesia, hampir tidak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh saudara kandungnya, imperialisme tua.

## LATAR KEBATINAN UUPA 1960 DAN UPAYA UNTUK MEMATAHKAN BELENGGU KETIDAKADILAN WARISAN KOLONIAL

Berdasarkan sejarah kejahatan kolonialisme dan imperialisme inilah

mengapa dulu *the Founding Fathers* dalam menyusun UUD 1945 menyatakan dengan tegas pada alenia pertama Pembukaan-nya, “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Pernyataan ini sesungguhnya merupakan “Tauhid Bangsa,” yang intinya adalah anti penjajahan dalam segala macam bentuk manifestasinya. Dan, semangat ini pula yang melandasi dan menjiwai tujuan berdirinya negara, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Senafas dengan semangat ini, terutama dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa - maka kemudian dirumuskan dasar demokrasi ekonomi yang bertujuan mewujudkan kemakmuran bagi semua orang,

<sup>2</sup> Penggunaan kata “naskah asli” untuk membedakannya dengan produk Undang-undang Dasar hasil amandemen 2002.

bukan kemakmuran bagi orang-seorang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 (naskah asli)<sup>2</sup>.

Namun sebelumnya, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi tersebut bukanlah rumusan demokrasi ekonomi versi WTO, IMF, WB, dll, seperti yang juga sering dikhotbahkan para “ekonom salon” selama ini, yaitu demokrasi ekonomi dalam pengertian ingin mengurangi peran negara sebesar mungkin untuk tujuan menerapkan kebijaksanaan ekonomi neoliberal seperti pasar bebas, liberalisasi, privatisasi, restrukturisasi, *governance*, liberalisasi pertanian, menaikkan harga-harga *public utilities*, dan lain-lain. Demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 (naskah asli) adalah demokrasi ekonomi yang ingin mengakhiri segala bentuk diskriminasi kesetaraan hak dan peluang pada segenap matra kehidupan rakyat, untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Ini bermakna sebagai penguatan posisi sosial-ekonomi rakyat melalui penghapusan stelsel warisan kolonialisme, imperialisme dan feodalisme, baik itu

ketidakadilan stelsel agraria, produksi, distribusi, konsumsi, dan lain-lain.

Pasal 33 UUD 1945 (naskah asli) terdiri atas tiga ayat, yaitu: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam menindaklanjuti amanat konstitusi ini, khususnya ketentuan ayat (3), penyelenggara negara kemudian menerbitkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA 1960). Kelahiran UUPA 1960 ini melalui perjalanan panjang yang memakan waktu sekitar 12 tahun lamanya. Perjalanan dimulai dari pembentukan “Panitia Agraria Yogya” (1948), “Panitia Agraria Jakarta” (1951), “Panitia Soewahyo” (1955), “Panitia Negara Urusan Agraria” (1956), “Rancangan Soenarjo” (1958), “Rancangan Sadjarwo” (1960), hingga kemudian baru dibahas dan diterima bulat

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), yang kala itu dipimpin Haji Zainul Arifin. Selanjutnya, pada tanggal 24 September 1960 Presiden Soekarno menandatangani penetapan undang-undang ini, dan beberapa tahun kemudian menerbitkan Keppres No. 169/1963 yang menetapkan tanggal 24 September itu sebagai Hari Tani Nasional.

UUPA 1960 dirumuskan berdasarkan pemahaman yang mendalam atas realitas susunan kehidupan dan perekonomian rakyatnya yang bercorak agraris, meyakini warisan hukum agraria kolonial memang bersendikan dan bertujuan pada kepentingan pemerintahan jajahan, menyadari bahwa hukum agraria kolonial itu bersifat dualisme, dan rakyat asli selama masa penjajahan tidak pernah mendapatkan kepastian hukum. Inilah sesungguhnya latar kebatinan UUPA 1960 sebagaimana

tersebut dalam pernyataan menimbanginya. Oleh karena itu, UUPA 1960 memiliki tujuan pokok, yaitu: (a) meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama *rakyat tani*, dalam rangka masyarakat adil dan makmur; (b) meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; dan (c) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya<sup>3</sup>. Di sinilah kita melihat betapa penyelenggara negara di masa itu sangat mengerti bahwa akar permasalahan bangsanya memang *terbenam kokoh* dalam ketidakadilan struktural warisan feodalisme, kolonialisme, dan imperialisme.

Memang, bila dilihat dari sudut pandang ekonomi-politik, bagi suatu bangsa bekas jajahan yang mewarisi belenggu ketidakadilan struktural

<sup>2</sup> Lihat Memori Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

<sup>4</sup> Dikutip dari Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 369).

<sup>5</sup> *Ibid.*,

feodalisme, kolonialisme, dan imperialisme, adalah mustahil akan dapat membebaskan rakyatnya jika tanpa lebih dulu mematahkan warisan belenggu struktural yang melilitnya itu. Kehadiran UUPA 1960 memang bermaksud untuk mematahkan belenggu itu dalam konteks pembaruan agraria, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 10. Itulah sebabnya kemudian lahir Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 (UU *Land reform*). Mengenai tujuan pelaksanaan *land reform* ini, dapat kita lihat dengan jelas dalam TAP MPRS Nomor II//MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Sementara Berencana Tahap Pertama 1961-1969, sebagaimana konsideran angka 5 yang menyatakan bahwa, “syarat pokok untuk pembangunan tata-perekonomian nasional adalah antara lain pembebasan berjuta-juta kaum tani dan rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme dengan melaksanakan “*land reform*”...<sup>4</sup>. Di samping itu, pasal 5 ayat (3) Ketetapan MPRS ini juga menegaskan bahwa “*Land reform* sebagai bagian mutlak dari

revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta yang didasarkan pada prinsip bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan<sup>5</sup>.”

## UPAYA MENYINGKIRKAN UUPA 1960 UNTUK KEPENTINGAN NEOIMPERIALISME

Sayangnya, pelaksanaan UUPA 1960 dan UU *Land reform* ini mengalami tantangan dan hambatan yang hebat dari beberapa kalangan politik tertentu ketika itu. Situasi ini kemudian diperparah lagi dengan munculnya ketegangan politik nasional yang tinggi, yang kemudian setelah terjadinya tragedi politik nasional pada tahun 1965, rezim Orde Baru pun tampil di singgasana kekuasaan. Rezim Orde Baru mulai mencanangkan strategi pembangunannya yang bersendikan paradigma pertumbuhan. Dipilihnya strategi ini dilatari oleh pemikiran bahwa keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh

peningkatan laju pertumbuhan ekonominya. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang kapitalistik itu, mula-mula diterbitkanlah sejumlah produk perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (maupun UU No. 41/1999 yang menggantikannya), Undang-undang No. 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-undang No. 1/1974 tentang Pengairan, dan lain-lain. Seiring dengan hal itu, dengan alasan stabilisasi politik, rezim ini pun menerapkan kebijaksanaan politik nasionalnya yang fasis untuk membungkam aspirasi rakyat<sup>6</sup>. Kesemua kebijaksanaan ini pada hakikatnya bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 (naskah asli). Semenjak ini, UUPA 1960 praktis mengalami delegitimasi, dan pelaksanaan *land reform* pun dihentikan.

Apa yang kita saksikan selama tiga dasawarsa pelaksanaan strategi pembangunan ini hanyalah menumbuhkan sejumlah “menara-

menara ekonomi” yang menjulang tinggi dan menghimpit posisi ekonomi rakyat. Budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan hampir di setiap tingkat kehidupan bernegara. Berbagai kontras dan disparitas pun terbentang di segenap matra kehidupan rakyat. Jumlah rumah tangga petani gurem dan buruh tani terus saja membengkak. Arus urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan semakin deras karena harapan hidup di pedesaan semakin tipis. Massa menganggur baik terbuka maupun terselubung terus meningkat. Ketidakmampuan sektor-sektor formal dalam menampung tenaga kerja secara berarti telah menimbulkan peningkatan jumlah pekerja sektor informal secara massif. Defisit neraca berjalan dan hutang luar negeri semakin membubung tinggi. Akhirnya krisis pun datang, dan terbukti kesalahan besar strategi pembangunan rezim Orde Baru ini. Kehadiran rezim Orde Baru ini ternyata bermakna malapetaka bagi rakyat Indonesia, terutama bagi rakyat tani yang *notebene* merupakan mayoritas warga bangsa.

<sup>6</sup> Bagi negara-negara Barat pilihan kebijaksanaan pembangunan seperti itu bukan masalah, mengingat rezim Orde Baru yang anti-komunis itu dapat dianggap sekutu ditengah-tengah konstelasi “perang dingin” kala itu.

<sup>7</sup> Realitas ini cermin ketidakberdayaan kekuatan politik nasional dalam menghadapi tekanan neoimperialisme.

Dampak krisis ekonomi pada tahun 1997 itu telah bermuara pada krisis politik, dan memaksa Jenderal Soeharto sebagai pemimpin rezim Orde Baru turun dari singgasana kekuasaan. Kejatuhan Soeharto ini oleh beberapa kalangan dimaknai sebagai simbol kemenangan bagi reformasi dan kaum reformis. Namun, reformasi ini bagi rakyat Indonesia ternyata bermakna sebagai penerapan murni kebijaksanaan neoliberalisme, sebagaimana keinginan IMF di dalam *Lol*-nya yang selalu dipatuhi setiap pemerintahan selama enam tahun reformasi ini<sup>7</sup>. Inti penerapan murni kebijaksanaan neoliberalisme ini, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hanyalah ingin mengurangi peran negara semaksimal mungkin dalam mengatur kehidupan sosial-ekonomi rakyatnya. Ini semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan menerapkan seperangkat kebijaksanaan ekonomi neoliberal seperti liberalisasi ekonomi, pasar bebas, privatisasi, restrukturisasi, *governance*, liberalisasi pertanian, menaikkan harga-harga *public utilities* dalam rangka kepentingan ekspansi modal kapitalis internasional.

Di tengah-tengah arus besar neoliberalisme inilah UUPA 1960 kembali menghadapi tantangan dengan munculnya sejumlah rancangan undang-undang seperti RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam, RUU Sumber Daya Air (yang kini telah disahkan DPR RI), RUU Perkebunan, RUU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetika, RUU Pertanahan, dan lain-lain. Kesemua materi rancangan undang-undang ini, bila diteliti secara saksama, telah menempatkan kekayaan alam nasional lebih sebagai *business opportunities* demi kepentingan globalisasi neoliberalisme daripada sebagai *basic rights* dalam konteks kepentingan riil ke-Indonesia-an kita. Artinya, segenap kekayaan alam nasional kita kini sedang berada dalam ancaman cengkeraman kuku-kuku kotor TNC/MNC, sehingga cita-cita mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan kembali menjadi fatamorgana. Seperti telah disinggung pada pendahuluan, di sinilah kita melihat nyaris tidak adanya perbedaan “karakter dasar” antara transisi era imperialisme tua ke imperialisme modern di masa kolonial dengan transisi dari era fasis kapitalistik ke

era penerapan murni kebijaksanaan neoliberalisme pada saat ini.

Dalam konteks tulisan ini, mari kita lihat RUU tentang Pertanahan yang disebutkan di atas. RUU ini adalah usulan Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dimaksudkan untuk merevisi UUPA 1960. Namun, oleh karena sejumlah pakar, LSM, dan PAH II MPR RI pada waktu itu sedang membahas Rantap MPR RI tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, maka BPN kemudian mengambil sikap untuk menangguhkan usulannya tersebut. Akan tetapi, terutama setelah lahirnya TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keppres RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, tampaknya BPN kini sedang menyiapkan sebuah rancangan undang-undang yang katanya ingin “menyempurnakan” UUPA 1960<sup>8</sup>. A p a k a h m a k s u d “menyempurnakan” ini dalam pengertian ingin membuat UUPA 1960 yang diyakini telah baik agar menjadi lebih baik lagi, atau “menyempurnakan” dalam

pengertian ingin menyesuaikan UUPA 1960 dalam pengertian menyongsong kepentingan globalisasi neoliberalisme? Tetapi mengingat upaya BPN itu sudah pasti mengacu pada TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dan Keppres RI Nomor 34 Tahun 2003, maka dapat diprediksi bahwa jiwa dan semangatnya tidak jauh berbeda dengan RUU tentang Pertanahan yang pernah diusulkan sebelumnya.

Masih segar dalam ingatan kita, sekitar tiga tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17-20 April 2001, di Cibubur, Jakarta, berlangsung Konferensi Nasional tentang “Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Petani” yang telah melahirkan Deklarasi tentang Hak-hak Asasi Petani dan Sembilan Resolusi yang mengandung tuntutan-tuntutan kepentingan masa depan nasib Rakyat Tani Indonesia. Salah satu dari sembilan resolusi itu adalah “Desakan Penghentian Prakarsa Badan Pertanahan Nasional Merevisi Undang-undang Pokok Agraria Menjadi Undang-Undang Pertanahan Nasional.” Dasar pemikiran para petani peserta

<sup>8</sup> Sumber: RUU tentang Pertanahan yang disampaikan pada diskusi tanggal 29 Maret 2001, di BPN, Jakarta.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Berdasarkan informasi dari pengurus serikat tani yang beraudiensi ke BPN.



konferensi yang melahirkan resolusi itu adalah: *pertama*, mereka mengakui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA 1960) sebagai sebuah karya utama penyelenggara negara di masa lampau yang ingin membebaskan rakyat tani dari belenggu ketidakadilan agraria warisan kolonialisme dan feodalisme. *Kedua*, mereka menyadari bahwa penyelenggara negara Orde Baru telah mengkhianati dan menyelewengkan UUPA 1960 melalui penerbitan sejumlah produk perundang-undangan agraria yang kesemuanya itu bertentangan dengan jiwa dan semangat UUPA 1960. Dan, *ketiga*, kondisi ini makin diperburuk lagi dengan kebijakan penyingkiran petani atas haknya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat regional, nasional, dan internasional (kepentingan globalisasi kapitalisme yang merugikan petani).

Memang, bilamana RUU tentang Pertanahan yang pernah diusulkan BPN itu diperiksa secara saksama, maka kita akan menemukan sejumlah kejanggalan yang secara substansial patut dipertanyakan. Pertama, BPN terkesan kuat telah

memvonis UUPA 1960 “gagal” dan tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Kesan ini bisa dilihat dalam pertimbangan butir (a), yang menyebutkan: “...dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia internasional”<sup>9</sup>. Kedua, kesimpulan mereka terhadap UUPA 1960 terlihat pada butir (c), menyebutkan: “... suatu peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan semangat kerakyatan, kebersamaan, dan keadilan namun hanya mengatur hal-hal yang pokok saja, sehingga di dalam pelaksanaannya di masa lalu, khususnya dalam pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah memungkinkan terjadinya penafsiran yang menyimpang dari semangat dan tujuan serta prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya;...”<sup>10</sup>. Dan, Ketiga, berdasarkan semua pertimbangan itu, pada butir (d) disebutkan: “...perlu dilakukan reformasi pertanahan agar dapat mengakomodasi perkembangan pembangunan dan globalisasi, ...”<sup>11</sup>.

Dari butir-butir pertimbangan RUU tentang Pertanahan usulan BPN ini dapat segera disimpulkan bahwa arah dan tujuan politik agrariannya sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat politik agraria UUPA 1960. Arah dan tujuan politik agraria RUU ini semata-mata hanyalah untuk menyongsong kepentingan globalisasi neoliberalisme. Kesimpulan ini menjadi tak terbantahkan bila kita melihat salah satu dari tujuan dan asasnya, pasal 6 ayat (2), yang menyatakan bahwa: “segala usaha bersama di bidang

pertanahan didasarkan ..., dengan mengutamakan bentuk koperasi atau pola kemitraan.”<sup>12</sup> Di sini kita melihat koperasi telah menjadi identik dengan pola kemitraan. Padahal kita mengetahui bahwa di dalam pola kemitraan terdapat suatu pola hubungan produksi yang tidak adil karena bersifat kapitalistik, dan telah terbukti gagal di masa Orde Baru. Kita mesti menyadari bahwa segala usaha yang didasarkan atas pola kemitraan itu bermakna terbentangnya “karpet merah” selebar-lebarnya untuk modal asing

yang akan menguras surplus ekonomi rakyat kita. Bilamana hal ini terjadi, nanti kita akan menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat kontras, yaitu dinamika ekonomi modern yang bebas sebebas-bebasnya -- akan berjalan beriringan dengan kehidupan massa rakyat yang masih lemah dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi nasional, karena masih berada dalam cengkeraman ketidakadilan struktural warisan feodalisme, kolonialisme dan imperialisme. Lantas kita pun bertanya, apakah ada perbedaan karakter antara politik agraria Orde Baru dengan politik agraria versi BPN ini?

Adalah kenyataan bahwa hampir setiap langkah dan kebijaksanaan pembangunan Orde Baru memang senantiasa merugikan kepentingan rakyat banyak. Tetapi, apakah semua pengalaman Orde Baru itu kemudian harus

<sup>12</sup> Ibid..